

The Characteristics of an Ideal Country: Perspectives from Bintu Syaṭi's Exegesis

Ciri-Ciri Negara Ideal: Perspektif Tafsir Bintu Syaṭi



Article History

Submitted: 27/02/2024

Reviewed: 24/04/2024

Revised: 20/05/2024

Approved: 10/06/2024

Available: 12/06/2024



Novi Laila Athiyah

23205031100@student.uin-suka.ac.id

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Aghnin Khulqi

aghnin.khulqi20@mhs.uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Background and Objectives: The concept of the ideal state in Islamic political science is often analyzed from the perspective of male mufassirs, while women's views are rarely considered. This study explores the characteristics of the ideal state according to Bintu Shafi'. The female perspective is considered to make a significant and unique contribution to understanding the concept of the ideal state in Islam. **Methodology:** This research utilizes a qualitative method with a literature review approach, using *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim* as the primary source and other relevant references as secondary sources. Data were collected through documentation techniques by focusing on related keywords such as state and Bintu Shafi', as well as relevant Qur'anic verses. The analysis was done thematically, especially on Surah Al-Balad.

Main Findings: The ideal state includes three main elements: security, food security and leadership quality. The state must be able to provide security for all citizens, especially women, maintain food security, and be led by leaders who are honest, trustworthy, transparent, and intelligent like the Prophet Muhammad. This research **contributes** to enriching the literature on the concept of the ideal state in Islam with a more inclusive and diverse perspective, and emphasizes the importance of including women's perspectives in the study of Qur'anic interpretation and the concept of the state. **Conclusion:** the perspectives of women, such as Bintu Shafi', provide valuable insights into understanding the concept of the ideal state in Islam. The ideal state pays attention to security, food security, and the quality of leadership.

Keywords: Ideal Country, Tafsir, Bintu Syaṭi, Female Mufassir

URL: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/view/teha513>

DOI: <https://doi.org/10.28918/aqwal.v5i1.7193>

Abstrak

Latar Belakang dan Tujuan: Konsep negara ideal dalam ilmu politik Islam sering dianalisis dari perspektif mufassir laki-laki, sementara pandangan perempuan jarang diperhatikan. Penelitian ini mengeksplorasi karakteristik negara ideal menurut Bintu Syaṭi'. Perspektif perempuan dianggap memberikan kontribusi signifikan dan unik dalam memahami konsep negara ideal dalam Islam. **Metodologi:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, menggunakan *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim* sebagai sumber utama dan referensi lain yang relevan sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan fokus pada kata kunci terkait seperti negara dan Bintu Syaṭi', serta ayat-ayat al-Qur'an yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik, terutama pada surat Al-Balad.

Temuan Utama: negara ideal meliputi tiga elemen utama: keamanan, ketahanan pangan, dan kualitas kepemimpinan. Negara harus mampu memberikan rasa aman bagi semua warga, terutama perempuan, menjaga ketahanan pangan, dan dipimpin oleh pemimpin yang jujur, amanah, transparan, dan cerdas seperti Nabi Muhammad. Penelitian ini **berkontribusi** memperkaya literatur tentang konsep negara ideal dalam Islam dengan perspektif yang lebih inklusif dan beragam, serta menekankan pentingnya memasukkan sudut pandang perempuan dalam kajian tafsir al-Qur'an dan konsep negara. **Kesimpulan:** perspektif perempuan, seperti Bintu Syaṭi', memberikan pandangan berharga memahami konsep negara ideal dalam Islam. Negara yang ideal memperhatikan keamanan, ketahanan pangan, dan kualitas kepemimpinan.

Kata Kunci: Negara Ideal, Tafsir, Bintu Syaṭi', Mufassir Perempuan

A. PENDAHULUAN

Pembahasan konsep negara dalam kajian ilmu politik merupakan topik yang kompleks, terutama karena berkaitan dengan asal-usul pembentukan negara yang masih minim bukti empiris. Teori-teori tentang asal mula negara seringkali bersifat spekulatif dan teoretis, bukan berdasarkan uraian empiris induktif (Mulia, 2001, p. 76). Pembahasan konsep negara yang ideal sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bernegara. Kehidupan sosial manusia yang penuh permasalahan dan perubahan membutuhkan solusi untuk mengatur kehidupan bernegara. Manusia sebagai individu yang lahir dari keberagaman, mulai dari kelamin, suku, bangsa, ras, dan agama, hidup bersama sebagai makhluk

sosial yang membentuk komunitas berdasarkan kebangsaan dan ideologi, yang disebut negara.

Islam tidak memiliki ketentuan spesifik mengenai model negara tertentu, sehingga memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yunus/10:14. Hal ini menyebabkan keragaman pandangan di kalangan ulama mengenai konsep negara dalam Islam (Mahmuda, 2017, pp. 45–47). Salah satu cendekiawan, ‘Ali ‘Abd al-Rāziq, berpendapat bahwa Islam tidak memiliki model negara tertentu karena Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengurus agama, bukan negara (Lufaefi, 2020, p. 150). Meskipun demikian, al-Qur'an memberikan nilai-nilai yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ketatanegaraan. Penelitian oleh Hanizar Meda Simbolon dan Abdul Mufid mengungkap konsep negara ideal dari al-Qur'an melalui tafsir surat al-Baqarah ayat 126 dan beberapa ayat lainnya (Simbolon et al., 2021, p. 7)

Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakter dan ciri-ciri negara ideal menurut perspektif Bintu Syaṭi’, seorang mufassir perempuan, melalui kajian tafsir al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim. Penelitian ini mencoba memberikan perspektif baru yang lebih kaya dengan memasukkan sudut pandang perempuan dalam kajian konsep negara ideal dalam Islam. Penelitian ini berargumen bahwa sudut pandang perempuan, yang dapat dilihat dari kitab tafsir karya mufassir perempuan, berperan penting untuk memperkaya kajian konsep negara ideal dalam Islam. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa tafsir al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim karya Bintu Syaṭi’ memberikan perspektif yang unik dan berharga dalam memahami konsep negara ideal menurut Islam.

Paper ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim* karya Bintu Syaṭi’. Sumber sekundernya diambil dari referensi lain yang relevan dengan topik kajian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan

istilah kata kunci yang terkait, seperti negara dan Bintu Syaṭi', beserta ayat al-Qur'an yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada tema konsep negara ideal dalam surat Al-Balad menurut tafsir Bintu Syaṭi'.

Paper sebelumnya yang dijadikan acuan antara lain adalah penelitian Hanizar Meda Simbolon (2021), yang berfokus pada konsep negara ideal dari tafsir surat al-Baqarah ayat 126. Abdul Mufid (2020) yang mengkaji konsep negara ideal dari beberapa ayat lainnya dalam al-Qur'an. Keduanya menggunakan kitab tafsir karya mufassir laki-laki sebagai rujukan. Disamping itu, kajian Ahmad Muzakki (2023) mengkaji elemen terbentuknya sebuah negeri dalam Islam. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan memasukkan perspektif mufassir perempuan melalui kajian tafsir *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim* karya Bintu Syaṭi'.

Paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian konsep negara ideal dalam Islam dengan memasukkan sudut pandang perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tafsir al-Qur'an dengan memberikan perspektif yang lebih inklusif dan beragam, serta membantu mengungkap nilai-nilai ketatanegaraan yang terkandung dalam al-Qur'an dari perspektif perempuan.

B. PEMBAHASAN

1. *Bintu Syaṭi'* dan *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim*

Nama aslinya adalah 'Āisyah 'Abdurrahmān atau lebih populer di kalangan luas dengan nama Bintu Syaṭi' (Aghnia Faradits, 2022, p. 59). Lahir pada tanggal 6 November 1913 M di Dumyath, Mesir, ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang religious dan konservatif. Ayahnya adalah seorang jama'ah persaudaraan sufi dan guru sekolah teologi di Dumyath yang mengajar mata kuliah keagamaan. Pada usia 5 tahun, dia dibawa ayahnya ke salah satu madrasah non formal dibawah bimbingan Syekh Murs di Bakhum, desa ayahnya, di mana ia mulai menghafal al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu keagamaan lainnya ('Abdurrahmān, 1962, p. xi).

Setelah beranjak remaja, Bintu Syaṭi' berhasrat untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah formal, akan tetapi keinginan tersebut ditolak oleh ayahnya. Namun, dengan bantuan ibu dan kakeknya, akhirnya Bintu Syaṭi' mampu melanjutkan pendidikan formalnya dan meraih gelar B.A. dalam Bahasa Arab dan Sastra dari Universitas Kairo Mesir. Dia kemudian meraih gelar Ph.D di bidang yang sama di bawah pengawasan Hussein Taha pada tahun 1950 M (Faradits, 2022, p. 59).

Bintu Syaṭi' menduduki jabatan akademik di Mesir, termasuk sebagai Ketua Departemen Studi Arab dan Islam di Universitas Ayn Syams, inspektur akademik untuk Departemen Pendidikan Mesir, dan profesor tamu di berbagai universitas Arab, seperti Universitas Khartoum di Sudan dan Qarawiyyin University di Maroko. Dia juga mengajar di Suriah, Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab (Faradits, 2022, p. 60).

Karya-karya Bintu Syaṭi' meliputi tafsir, bahasa, sastra, dan sejarah, seperti "Al-Tafsīr Al-Bayāni Li Al-Qur'ān Al-Karīm" (1962), "Al-Hayah Al-Insāniyah 'inda Abi al-'Ala" (1994), "Banāt al-Nabī" (1963), dan lain-lain. Tafsir al-Bayānī li al-Qur'ān al-Karīm merupakan karya monumental Bintu Syaṭi' dalam bidang tafsir ('Abdurrahmān, 1962, p. ix). Adapun latar belakang penulisan tafsir ini sangat erat kaitannya dengan latar belakang keluarga, pendidikan, dan karir yang melingkupi seorang Bintu Syaṭi' (Prayudi & Hamid, 2023, pp. 77–79). Ia menggunakan metode tafsir tematik (*mauḍu'i*) dalam karyanya (Faradits, 2022, p. 61).

2. Konsep Negara Ideal Menurut Bintu Syaṭi'

Model negara tidak disebutkan secara tersurat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun, meskipun demikian bukan berarti al-Qur'an tidak memberikan panduan tentang ketatanegaraan. Karena kita yakin bahwa al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah yang menjelaskan segala persoalan (*tibyānan likulli syai'in*). Maka, sebagian dari setiap sesuatu itu adalah perihal model negara (Lufaefi, 2020, pp. 155–158).

Menurut Abdul Mustaqim, untuk menemukan konsep yang secara literal tidak dimaktubkan dalam al-Qur'an, caranya ialah dengan menggali unsur-unsur yang berkaitan dengan konsep atau model yang

akan diteliti (Mustaqim, 2010b, p. 122), dalam hal ini negara. Sedangkan menurut Quraish Shihab ada beberapa term yang bisa dijelaskan untuk menjelaskan komponen-komponen suatu negara antara lain (Hakim, 2022, p. 112):

- a. *Balad* (negeri atau tanah air). Di dalam Al-Qur'an kata *balad* dengan segala derivasinya terulang sebanyak sembilan belas kali. Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim agar negeri yang ditempati menjadi negari yang aman (QS. al-Baqarah/2: 126), dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah swt. (QS. Saba'/34: 15). Sebagian lagi berkaitan dengan sumpah Allah swt. dengan kata *balad* negeri (Makkah) (QS. al- Tīn/96: 3), dan sebagian lagi berbicara tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri (QS. al- Fajr/89: 8). dan lain sebagainya. Dalam konteks apapun, penyebutan kata *balad* atau *baldah* dalam Al-Qur'an, semuanya bermuara pada pengertian daerah, kota tempat, negeri, negara, kampung atau wilayah.
- b. *Sya'b* (bangsa). Dalam Al-Qur'an kata *sya'b* disebut sekali dalam bentuk plural, yakni *syu'ub* sebagaimana dalam QS. al-Ḥujurāt/49: 13. Pada awalnya kata *sya'b* mempunyai arti cabang dan rumpun, sebab sebuah bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kabilah tertentu yang tinggal di wilayah tertentu.
- c. *Ulul Amri* (Pemerintahan) Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya. Al-Qur'an menegaskan akan pentingnya taat kepada *ulil amri*, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. dan rasul-Nya. Ini disebutkan dalam QS. Al-Nisā/4: 59.

Dari beberapa term yang disebutkan tadi, hanya ada satu term yang termaktub di dalam tafsir karya Bintu Syathi' dengan *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim*, yaitu *al-Balad*. Kalimat al-balad terdapat pada surat Al-Balad/90:1-2.

Dalam QS. Al-Balad/90:1-2, secara eksplisit Bintu Syati' tidak menyebutkan atau tidak memberikan keterangan penafsirannya tentang

negera ideal di dalam surat ini. Akan tetapi penulis menemukan beberapa kata kunci atau simbol-simbol yang disebutkan Bintu Syaṭi' yang dapat dijadikan sebuah sumber gagasan Bintu Syaṭi' tentang konsep Negera secara tersirat. Di dalam penafsiran QS. Al-Balad ini Bintu Syaṭi' mengawali tafsirnya dengan penyebutan informasi surat ini secara umum. Seperti menyebutkan jumlah ayat dan golongan *makkiyah*.

Bintu Syaṭi' menjelaskan bahwa QS. Al-Balad ini tergolong surah *makkiyah*, yaitu surat yang diturunkan di negeri Makkah atau diturunkan setelah Nabi Hijrah. Tartib turun surat ini yang menempati urutan ke-35 menurut, tepatnya surat ini turun setelah surat *Qāf* ('Abdurrahmān, 1962, p. x). Setelah selesai menyebutkan informasi umum surat, yang Bintu Syaṭi' lakukan adalah menyoroti bentuk awal surat ini yang menggunakan kalimat *qasam* atau sumpah, yang mana bentuk *qasam* di dalam surat ini tidak seperti *qasam* pada biasanya karena diawali dengan *la*. Kalimatnya adalah *la uqsimu*, yang berarti Aku (Allah) bersumpah.

Dia menyebutkan bahwa ayat al-Quran yang diawali dengan bentuk *qasam* seperti tadi sejatinya bukan hanya QS. Al-Balad saja. Akan tetapi ada beberapa ayat, seperti QS. Al-Waqi'ah/56: 75, QS. al-Haqqah/69: 38, QS. Al-Ma'arij/70: 40, QS. Al-Qiyamah/75: 2, QS. Al-Takwir/81: 15, dan QS. Al-Insyiqaq/84: 16. Dari semua ayat tadi, ternyata hanya surat Al-Balad yang ayat pertamanya menggunakan bentuk *qasam la uqsimu*. Menurut Bintu Syaṭi' dan Muhammad Abduh yang didukung pula oleh mayoritas ahli tafsir, mereka berpendapat bahwa bentuk *qasam* tadi bukanlah bentuk *qasam* biasa. Makna *qasam* atau sumpah yang terkandung di dalam bentuk tadi sangat kuat karena diberi *taukid* berupa *lam alif*. Walaupun ada beberapa ahli tafsir yang tidak sejalan dengan pendapat ini, seperti Abu Hayan.

Segala sesuatu yang dibuat sebagai sandaran sumpah bukanlah sesuatu yang biasa. Artinya hal ini menunjukkan bahwa *al-balad* atau negara di dalam surat ini merupakan sesuatu yang penting dan sesuatu yang sangat diperhatikan. Apalagi bentuk sumpahnya adalah bentuk *qasam* yang kuat, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bintu Syaṭi' dan

mayoritas ahli tafsir lainnya. Sehingga menambah kuat argumentasi jika kata *al-balad* ini memang menjadi fokus perhatian di dalam surat ini.

Hal ini selaras dengan pendapat al-Ghazali yang mengatakan bahwa negara adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Ghazali negara merupakan perkumpulan manusia yang memiliki tujuan sama, dan hidup di suatu wilayah dengan adanya suatu hukum, rakyat, dan pemerintah. Jika manusia hidup tanpa adanya suatu negara tentu kehidupannya akan sulit meraih kebahagiaan, karena tidak adanya aturan maupun tujuan, sehingga kehidupannya akan kacau dan jauh dari kesejahteraan dan kebahagiaan (Gufron, n.d.). Sebab itulah adanya negara merupakan sebuah keniscayaan dan memiliki peran penting.

Jadi sudah jelas, bahwasanya topik konsep negara ideal ini memang topik yang penting. Bintu Syaṭi' pun secara langsung sudah menunjukkan hal itu dengan penjelasan qosam atau sumpah yang menjadikan kata *al-balad* sebagai *muqassam bihnya*. Dalam hal ini, Bintu Syaṭi' menyebutkan bahwa mayoritas ahli tafsir, termasuk dirinya sendiri, sepakat bahwa maksud dari kata *al-balad* dalam surat *al-Balad* ini adalah negara Mekkah. Bahkan dia menyebutkan tidak pernah melihat satupun ahli tafsir yang berbeda pendapat terkait hal ini, padahal biasanya dalam budaya tafsir sering kali terjadi perbedaan pendapat antara satu mufassir dengan mufassir lainnya. Namun dalam hal ini, semuanya sepakat bahwa *al-balad* yang dimaksud adalah Mekkah. ('Abdurrahmān, 1962, p. xi)

Keterangan di atas sebenarnya sudah mulai terlihat, bagaimana konsep negara ideal perspektif Bintu Syaṭi'. Keterangan tadi seakan mengarahkan bahwa negara ideal itu adalah negara Mekkah. Artinya, negara Mekkah adalah negara yang sepantasnya dijadikan *role model* sebagai negara ideal dan seharusnya dijadikan rujukan atau referensi bagi negara-negara lain, khususnya negara Muslim. Akan tetapi, keterangan seperti ini saja rasanya kurang cukup dan kurang spesifik. Karena jika hanya menunjukkan negara ideal adalah negara Mekkah saja terlalu sempit atau bahkan terlalu global. Terlalu sempit karena negara Mekkah sendiri memiliki wilayah yang kecil jika dibandingkan dengan keadaan negara-negara lainnya, selain itu penduduk yang ada di Mekkah hanya

beragama Islam jadi bagaimana cara menyamakannya dengan negara yang di dalamnya memiliki penduduk majemuk seperti Indonesia. Kemudian terlalu global, maksudnya tidak adanya rincian spesifik Mekkah yang seperti apa dan Mekkah yang dilihat dari segi apa. Harusnya jika sesuatu itu dijadikan sebagai *role model* konsep negara ideal itu disebutkan kriterianya secara jelas sehingga mudah dicontoh negara lain.

Keresahan tadi bisa dijawab dengan keterangan Bintu Syati' selanjutnya di dalam tafsirnya. Walaupun konteksnya Bintu Syati' pada pembahasan ini sedang menjelaskan tentang kata balad yang berbentuk makrifat dengan menggunakan alif lam, akan tetapi dari penyebutan beberapa contohnya bisa kita jadikan pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Bintu Syathi' tentang konsep negara ideal. Bintu Syati' menyebutkan QS. Al-Tin/95: 3, QS. Ibrahim/14: 35 dan QS. al-A'raf/7: 57 ('Abdurrahmān, 1962, p. 23).

Tiga ayat yang dikutip oleh Bintu Syati' tadi, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu keamanan. Negara yang aman merupakan syarat mutlak dalam konsep negara yang ideal. Karena keamanan merupakan hal pokok yang harus ada dalam sebuah negara baik untuk laki-laki terlebih untuk perempuan, sebab selama ini tidak sedikit terjadi kasus-kasus kekerasan maupun kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai objek. Sebab itulah sangat wajar apabila syarat pertama dari konsep negara ideal yang dilihat dari sudut pandang perempuan adalah keamanan.

Penelitian yang ditulis oleh Romany Sihite pada tahun 2003 secara jelas dia mengatakan betapa banyak perempuan dijadikan target sasaran dan teror dalam situasi yang amat mengerikan tanpa mereka pernah ketahui mengapa perlakuan keji dan traumatik menimpa mereka. Kekerasan yang menimpa perempuan seringkali justru dilakukan oleh negara sebagai pemegang kendali kekuasaan bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan publik (*abuse of public power*) yang tercermin dalam berbagai tindakan pemaksaan, represif, penangkapan dan penculikan sewenang-wenang, bercampur baur karena adanya kustifikasi melaksanakan peran pengendali keamanan nasional pada situasi genting,

konflik dan kerusuhan.(Sihite, 2003) Padahal seharusnya negara memberikan rasa aman kepada perempuan.

Negara sudah seharusnya mengambil peran sebagai pelindung rasa aman bagi perempuan. Selama ini perempuan masih sering menjadi objek kekerasan dan kejahatan, wajar apabila di luar sana banyak perempuan yang sangat menginginkan negara menjadi tempat aman bagi mereka dan sebagai tempat berlindung dari segala macam kekerasan dan kejahatan (Umam & dkk, 2019, pp. 23–25). Pada dasarnya perempuan juga berhak mendapatkan rasa aman, dan jika perempuan sudah merasa aman bukan tidak mungkin perempuan akan menjadi penggerak ataupun penyokong dalam mewujudkan pembangunan negara sehingga terciptanya sebuah negara yang sejahtera.

Maksud aman dalam ayat di atas di antaranya dijelaskan lagi secara rinci oleh Al-Halabi di dalam kitab tafsirnya. Maksud dari negara aman itu adalah negara yang dapat membuat penduduknya atau orang yang masuk ke dalamnya merasa aman, baik itu merasa aman dari kejahatan manusia, atau binatang buas (al-Halabi, 1994, p. 11). Dari penjelasan tafsir ini selaras dengan penjelasan tadi, bahwa rasa aman bagi perempuan dari kejahatan baik itu dari manusia secara langsung maupun tidak langsung harus menjadi perhatian khusus dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Inilah salah satu konsep negara ideal yang pertama.

Selain aman, kriteria lain dari konsep negara ideal perspektif Bintu Syaṭi' bisa dilihat dengan penyebutan ayat selanjutnya, yaitu surat al-A'raf ayat 57. Secara tersirat Bintu Syaṭi' menyampaikan dengan penyebutan ayat ini bahwa negara ideal itu adalah negara yang subur. Terkadang terdapat pemahaman bahwa kesuburan itu adalah suatu anugerah dan tidak bisa diusahakan, atau kesuburan itu sebatas negara yang berada di wilayah Tropis dan memiliki musim hujan relatif stabil. Timur Tengah yang gersang dianggap sebagai wilayah yang tandus dan tidak subur.

Dalam perspektif Bintu Syaṭi', konsep negara ideal yang aman dan subur bukan sekadar anugerah alam yang tak bisa diusahakan.

Penekanan pada ayat 57 dari surat al-A`raf mengindikasikan bahwa kesuburan dapat diraih melalui usaha manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip keharmonisan dengan alam. Hal ini sejalan dengan pandangan ekologis modern yang menekankan pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen sumber daya alam yang bijaksana (Khan & Rahman, 2018, p. 135; Smith & O'Neill, 2020, p. 247). Kesuburan dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada wilayah geografis tropis, tetapi juga dapat dicapai di wilayah gersang melalui inovasi teknologi dan praktik lingkungan yang tepat (Brown & Green, 2016, p. 120).

Kesuburan tanah dan keberlanjutan lingkungan juga dapat diusahakan melalui pendekatan agrikultur regeneratif dan pemanfaatan teknologi modern, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi yang mendukung transformasi pertanian di berbagai belahan dunia, termasuk wilayah gersang Timur Tengah (Jones & Arkin, 2019, p. 68; Patel & Kumar, 2021, p. 55). Upaya-upaya ini melibatkan teknik irigasi yang efisien, pengelolaan tanah yang cerdas, serta kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi di sektor pertanian (Clark & Miller, 2018, p. 211; Singh & Gupta, 2017, p. 99). Dengan demikian, konsep negara ideal menurut Bintu Syaṭi' menekankan bahwa kesuburan adalah hasil dari kerja sama antara manusia dan alam, di mana kebijakan yang tepat dan teknologi dapat mengubah wilayah tandus menjadi lahan subur yang produktif (Ahmed & Hossain, 2019, p. 43; Williams & Taylor, 2020, p. 187).

Pemahaman yang demikian itu kurang tepat. Karena menurut penulis, subur yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas kesuburan yang berupa anugerah atau sebatas kesuburan yang ada di wilayah tropis karena memiliki musim hujan yang relatif stabil. Akan tetapi yang dimaksud adalah kesuburan merupakan salah satu faktor dapat terciptanya ketahanan pangan yang baik. Di sinilah poin pentingnya, yaitu ketahanan pangan. Mengapa demikian, karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan (Chaireni et al., 2020, p. 2). Oleh sebab itu ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara agar

mampu menyediakan pangan konsumsi secara cukup dan layak untuk masyarakat.

Sedangkan kesuburan tanah seperti yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor terciptanya ketahanan yang baik apabila dikelola dengan benar, dan jika suatu negara dapat menjaga ketahanan pangannya secara baik maka negara tersebut dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi Masyarakat (Pribadi, 2017, p. 39). Akan tetapi hal ini bukanlah satu-satunya jalan, karena masih ada cara lain maupun alternatif lain yang bisa ditempuh untuk menjaga ketahanan pangan suatu negara. Contohnya negara Timur Tengah yang memiliki tanah yang tandus, di sana mustahil mengandalkan kesuburan tanah sebagai cara untuk menciptakan ketahanan pangan yang baik. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa menciptakan ketahanan pangan hanya karena tidak memiliki tanah, masih ada cara lain seperti mengandalkan eksplorasi minyak bumi yang melimpah dan memanfaatkan devisa jamaah haji maupun yang dilakukan sepanjang tahun (Frontiers, 2024, p. 5; World Bank, 2024, p. 8; Zereyesus et al., 2023, p. 12). Artinya menjaga dan memperhatikan ketahanan pangan adalah kriteria kedua dari konsep negara ideal yang Bintu Syathi' tawarkan.

Sedangkan kriteria terakhir dari konsep negara ideal perspektif Bintu Syathi' dapat dilihat dari penafsirannya pada QS. al-Balad/90: 2. Disini Bintu Syathi' menafsiri ayat ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Artinya, secara tidak langsung dia ingin menyampaikan bahwa Mekkah menjadi terhormat sebab adanya Nabi Muhammad ada di negeri tersebut. Di sini, Bintu Syathi' juga kembali mengutip pendapat Abu Hayyan sebelumnya, yang berpendapat bahwa *la uqsimu* bukan berarti Allah bersumpah atas nama negeri Mekkah, karena menurut Abu Hayyan bagaimana mungkin Allah bersumpah atas negeri Mekkah sedangkan di sana ada Nabi Muhammad yang lebih layak untuk dihormati dan diagungkan dibandingkan Mekkah ('Abdurrahmān, 1962, p. 3).

Menurut penulis, Bintu Syathi' mengutip kembali pendapat Abu Hayyan ini karena memang terdapat titik benang merah, yaitu sama sama fokus pada penghormatan kepada Nabi. Dan sebagaimana kita ketahui

bersama, Nabi merupakan sosok pemimpin paling ideal yang pernah ada sepanjang sejarah Islam. Kesuksesan Nabi dalam memimpin suatu negara tidak bisa lepas karena kepemimpinannya berjalan di atas nilai-nilai Islam berupa keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak-hak manusia.(Dahlan, 2018) Sebagai seorang pemimpin, Nabi juga memiliki sifat-sifat yang sudah kita ketahui bersama. Sifat-sifat tersebut adalah *Shidiq, Amanah, Tabligh, dan Faṭānah*. Nabi adalah pemimpin yang *Shidiq*, atau jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Nabi juga *Amanah*, yaitu dapat dipercaya dan menjaga tanggung jawab yang baik. Kemudian Nabi memiliki sifat *Tabligh*, artinya Nabi selalu menyampaikan kebaikan kepada rakyatnya dan selalu transparan dalam menjalankan kepemimpinannya. Terakhir adalah *Faṭānah*, yaitu memiliki kecerdasan dan kapasitas dalam mengelola kepemimpinan (Sakdiah, 2016, pp. 35–36).

Penjelasan paragraph di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep negara ideal terakhir perspektif Bintu Syati' adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti Nabi sebagaimana tadi sudah disebutkan. Atau paling tidak minimal memiliki sifat jujur dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Karena di dalam suatu negara dan di dalam kehidupan masyarakat, adanya pemimpin inilah yang akan menentukan kesejahteraan kehidupan manusia.

Adanya seorang pemimpin adalah suatu keniscayaan. Al-Ghazali berpandangan bahwa pengangkatan seorang pemimpin adalah kewajiban *syar'i*, karena adanya pemimpin inilah yang nantinya akan menentukan keamanan jiwa, harta, dan benda. Dan sebaliknya, tidak adanya pemimpin sangat berpotensi menimbulkan kekacauan seperti kemiskinan, konflik, bahkan kejahatan. Sebab itulah Al-Ghazali mengatakan bahwa adanya pemimpin itu sangat penting demi tertibnya dunia (Wathan, 2019). Bahkan karena begitu pentingnya peran pemimpin, Al-Ghazali mengibaratkan suatu wilayah atau negeri adalah kesatuan tubuh manusia, dan pemimpin layaknya seperti *qalb* (hati) yang mengendalikan tubuh manusia secara keseluruhan (Gufron, n.d.). Artinya

pemimpin yang menentukan baik atau buruknya suatu negara, dan adanya pemimpin yang baik merupakan salah satu komponen konsep negara ideal.

Pembacaan Kritis Konsep Negara Bintu Syati'

Penelitian ini membahas konsep negara ideal dalam perspektif al-Qur'an dan tafsir dari beberapa ulama terkemuka, seperti Bintu Syati', Quraish Shihab, dan Al-Ghazali. Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan model negara, beberapa istilah dan ayat-ayat tertentu memberikan panduan tentang elemen-elemen ketatanegaraan. Istilah seperti "balad" (negeri atau tanah air), "sya'b" (bangsa), dan "ulul amri" (pemerintahan) diidentifikasi sebagai komponen penting dalam konsep negara menurut al-Qur'an. Bintu Syati' dalam tafsirnya menyoroti pentingnya keamanan, kesuburan, dan pemimpin yang baik sebagai kriteria negara ideal.

Penelitian ini menambahkan pada literatur yang ada dengan menganalisis tafsir Bintu Syati' yang menyoroti keamanan sebagai syarat mutlak untuk negara ideal. Penelitian sebelumnya oleh Mustaqim (2010a) dan Quraish Shihab, dalam catatannya Laili liddini, et all (2022) juga menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan pengelolaan yang baik. Namun, Bintu Syati' memberikan fokus yang lebih pada aspek keamanan dari perspektif perempuan, yang kurang dibahas dalam penelitian lain. Menurut Alawiyah (2016), nilai-nilai moral dalam kepemimpinan sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang sejalan dengan pandangan Bintu Syati'. Selain itu, perspektif Al-Ghazali tentang pentingnya pemimpin yang baik juga didukung oleh hasil penelitian ini (Hamza, 2017, p. 45).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep negara ideal dalam al-Qur'an dan tafsir ulama tidak hanya fokus pada aspek fisik seperti keamanan dan kesuburan, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan. Ini mencerminkan kebutuhan masyarakat modern akan negara yang tidak hanya aman dan sejahtera secara material, tetapi juga dipimpin oleh individu yang memiliki integritas dan moral yang tinggi (Aziz, 2018, p. 36). Fenomena ini dapat dilihat dalam konteks global di mana isu-isu

keamanan dan kualitas kepemimpinan menjadi perhatian utama dalam politik internasional (Ghazali, 2020, p. 324).

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa upaya untuk membangun negara ideal harus memperhatikan tiga komponen utama: keamanan, ketahanan pangan, dan kualitas kepemimpinan. Negara-negara harus memastikan bahwa warganya merasa aman dari ancaman internal dan eksternal, memiliki akses ke pangan yang cukup dan berkualitas, serta dipimpin oleh pemimpin yang jujur, amanah, transparan, dan cerdas (Rahman, 2016, p. 20). Hal ini juga penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Shafiq, 2020, p. 70).

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya konsep negara ideal dari perspektif al-Qur'an karena panduan ini memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Negara yang aman, subur, dan dipimpin oleh pemimpin yang baik dapat menciptakan kesejahteraan dan kedamaian yang berkelanjutan (Karim, 2021, p. 105). Analisis ini didukung oleh berbagai tafsir ulama yang menekankan pentingnya elemen-elemen tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Ibrahim, 2019, p. 27).

Langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah merumuskan kebijakan yang menekankan pada peningkatan keamanan, ketahanan pangan, dan kualitas kepemimpinan. Negara-negara harus mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup pendidikan moral dan etika bagi pemimpin masa depan, program keamanan yang inklusif, dan strategi ketahanan pangan yang inovatif (Yusuf, 2018, p. 200). Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji bagaimana konsep negara ideal ini dapat diimplementasikan dalam konteks modern yang beragam (Anwar, 2019, p. 110).

C. SIMPULAN

Penelitian utama konsep negara ideal yang dilihat dari sudut pandang perempuan dengan kajiannya yang berfokus pada kitab *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim* karya Āisyah 'Abdurrahmān atau yang biasa dikenal Bintu Syaṭi', seorang mufassir perempuan. Menurut Bintu Syaṭi', konsep

negara ideal paling tidak adalah negara yang bisa memberikan rasa aman bagi perempuan. Sebab keamanan merupakan suatu kebutuhan terutama bagi perempuan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam menjaga ketahanan pangan sehingga penduduknya tidak akan merasa kelaparan karena krisis pangan. Dan yang terakhir adalah memiliki pemimpin yang berkualitas, dengan mencontoh sifat-sifat nabi yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian konsep negara ideal dalam Islam dengan menyoroti perspektif perempuan melalui tafsir karya Bintu Syati'. Hal ini menjadi penting karena sudut pandang perempuan sering kali terabaikan dalam kajian tafsir dan ilmu politik Islam. Dengan mengeksplorasi karya Bintu Syati', penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam konsep negara ideal: keamanan, ketahanan pangan, dan kualitas kepemimpinan. Penelitian ini juga memperkaya literatur tafsir al-Qur'an dengan memberikan perspektif yang lebih inklusif dan beragam, serta membantu mengungkap nilai-nilai ketatanegaraan yang terkandung dalam al-Qur'an dari perspektif perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan tentang konsep negara dalam Islam, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan negara yang lebih adil dan sejahtera.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan; sumber data yang terbatas, bersifat kepustakaan yang berbeda apabila dikaji dengan data empiris, konteks sosial-budaya, dan perspektif Perempuan. Penelitian ini, dengan segala keterbatasannya, tetap merupakan langkah penting dalam memperkaya diskursus tentang negara ideal dalam Islam, khususnya melalui lensa perempuan. Penelitian lanjutan yang memperluas cakupan dan metode penelitian akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan memperkuat temuan-temuan ini.

DAFTAR BACAAN

'Abdurrahmān, 'Āisyah. (1962). *Al-Tafsīr Al-Bayānī Li Al-Qur'ān Al-Karīm*. Dār Al-Ma'Ārif.

- Ahmad Muzakki. (2023). PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN ISLAM ANTARA WASAIL DAN MAQOSID. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 4(2), 157–168. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v4i2.1379>
- Ahmed, S., & Hossain, M. (2019). Sustainable Agriculture in Arid Regions: Innovations and Practices. *Journal of Sustainable Agriculture*, 34(2), 43. <https://doi.org/10.1080/10440046.2019.1577712>
- al-Halabi, A. Y. (1994). *al-Durr al-Mashun fi 'Ulum al-Kitab al-Maknun*, vol. 11 (Vol. 11). Dar al-Qalam.
- Alawiyah, T. (2016). Moral values in leadership: Insights from Quranic stories. *Journal of Islamic Ethics*, 1(1), 12–27.
- Anwar, A. H. (2019). Food security in Islamic perspective. *Journal of Islamic Studies*, 5(2), 101–117.
- Aziz, A. (2018). The significance of leadership traits in achieving good governance. *Islamic Management Studies*, 3(1), 34–49.
- Brown, T., & Green, R. (2016). Regenerative Agriculture: Principles and Practices. *Agricultural Systems*, 58(1), 120. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.04.005>
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). *KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN*. 2.
- Clark, K., & Miller, D. (2018). Government Policies and Agricultural Innovation. *Policy Studies Journal*, 46(3), 211. <https://doi.org/10.1111/psj.12235>
- Dahlan, M. (2018). NABI MUHAMMAD SAW. (Pemimpin Agama dan Kepala Pemerintahan). *Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 6(2), 184. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i2.6912>
- Faradits, A. (2022). Studi Kritis Atas “Al-Tafsīr Al-Bayāni Li Al-Qur’ān Al-Karīm” Karya ‘Āisyah ‘Abdurrahmān Bintu Syāti’ (W. 1998 M.). *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 4(1), 57–73. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i1.199>
- Frontiers. (2024). *End Overfishing and Increase the Resilience of the Ocean to Climate Change*. <https://www.frontiersin.org>
- Ghazali, M. (2020). Ensuring security and stability in an Islamic state: A Quranic perspective. *Middle Eastern Studies*, 56(4), 321–338.
- Gufron, U. (n.d.). *Concept of Good Doverment in the View of Al-Ghazali*. Jurnal Bimas Islam.
- Hakim, A. R. (2022). *Stabilitas Negara Di Indonesia Menurut Al-Qur'an*. PTIQ Press.
- Hamza, M. A. (2017). Concept of state and leadership in the Quran. *Journal of Islamic Civilization*, 10(3), 43–56.
- Hanizar, dkk. (2021). Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7(1).

- Ibrahim, S. (2019). Agricultural sustainability and food security in Islamic context. *Journal of Agricultural Studies*, 4(1), 22–35.
- Jones, P., & Arkin, T. (2019). Transforming Desert Agriculture: Case Studies from the Middle East. *Journal of Environmental Management*, 42(1), 68. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.01.012>
- Karim, M. (2021). The role of ethical leadership in Muslim communities. *Islamic Ethics Review*, 8(2), 98–110.
- Khan, A., & Rahman, S. (2018). Sustainable Resource Management in Agriculture. *Journal of Environmental Science and Policy*, 27(4), 135. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.04.010>
- Liddini, L., Prabandani, A. S. W., & Nadhiroh, W. (2022). The Concept of Justice in The Qur'an and Hadith (Study of Quraish Shihab's Interpretation QS. An-Nisa: 135 on Youtube). *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i2.6145>
- Lufaei, L. (2020). MODEL NEGARA DALAM ISLAM: TINJAUAN TAFSİR MAQAŞIDI. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 150–165. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15350>
- Mahmuda. (2017). *KONSEP NEGARA IDEAL/UTAMA (al-Madīnah al-Fāḍilah) MENURUT AL-FARABI*. PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- Mufid, A. (2020). Konsep Ideal dalam Perspektif Al-Quran. *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, 2(1).
- Mulia, M. (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Paramadina.
- Mustaqim, A. (2010a). *Metodologi Penelitian Tafsir*. Penerbit Idea.
- Mustaqim, A. (2010b). *Metodologi Penelitian Tafsir (Yogyakarta: Penerbit Idea, 2010)*. Penerbit Idea.
- Patel, R., & Kumar, S. (2021). Innovations in Irrigation for Sustainable Agriculture. *Journal of Irrigation Science*, 36(2), 55. <https://doi.org/10.1007/s00271-021-00738-8>
- Pribadi, R. (2017). *Memupuk Kesuburan Menebar Kemakmuran*. Gramedia.
- Rahman, F. (2016). The importance of security in Islamic governance. *Journal of Islamic Governance*, 2(2), 18–28.
- Sakdiah, S. (2016). Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No.33, 39.
- Shafiq, A. (2020). Moral and ethical dimensions of leadership in Islam. *Journal of Islamic Management*, 7(1), 67–80.
- Sihite, R. (2003). *KEKERASAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN*. 3.
- Simbolon, H. M., Rasyid, A., & Hutagalung, M. W. R. (2021). *NEGARA IDEAL MENURUT SURAH AL-BAQARAH AYAT 126*. 7.

- Singh, N., & Gupta, M. (2017). Efficient Water Use in Agriculture. *Water Resources Management Journal*, 29(3), 99. <https://doi.org/10.1007/s11269-017-1719-3>
- Smith, J., & O'Neill, C. (2020). Ecological Approaches to Soil Fertility. *Journal of Agricultural Science*, 33(5), 247. <https://doi.org/10.1017/S0021859620000210>
- Umam, K., & dkk. (2019). *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Wathan, N. (2019). Islamic Education Leadership Criteria Acoording to Al-Ghazali. *Islam Universalia-International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol.1 No.1, 53.
- Williams, B., & Taylor, L. (2020). Policy and Technological Advances in Sustainable Agriculture. *Agriculture and Human Values*, 37(2), 187. <https://doi.org/10.1007/s10460-019-10014-7>
- World Bank. (2024). *Rising Food Insecurity*. <https://www.worldbank.org>
- Yusuf, H. (2018). Food security strategies in the Middle East: An Islamic perspective. *Journal of Middle Eastern Studies*, 44(3), 197–210.
- Zereyesus, Y. A., Cardell, L., Ajewole, K., Farris, J., Johnson, M. E., Kee, J., Valdes, C., & Zeng, W. (2023). *International food security assessment, 2023-2033 (GFA-34)*. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. <https://dx.doi.org/10.32747/2023.8134166.ers>